

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hay, Marhainis. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan beberapa kaitannya dengan UUD 1945 Jilid I*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bobby R Manalu, Nien Rafles Siregar, Rudi Setiawan, *Bahasa dan Kontrak: Mengurai Polemik Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing*, Jakarta: Siregar Setiawan Manalu Partnership, 2016.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Istanto, F. Sugeng. *Penulisan Hukum*, Yogyakarta: CV Ganda, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Moentaha, Salihen. *Bahasa dan Terjemahan, cet 1*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2006.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum, cetakan 3*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, ed. 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Nuh, Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur Bandung, 1999.
- S., Salim H. *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1994.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012.

Soeroso. R., *Pengantar Ilmu Hukum, cet 6*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet 33*, Jakarta: PT Intermasa, 2008.

Subekti. *Hukum Perjanjian, cet. 10*, Jakarta: PT. Intermasa, 1985.

Wahjono, Padmo. *Kuliah-Kuliah Ilmu Negara, cet 1*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1996.

Jurnal

Hasanah, Ulfatul. “Tanggung Gugat Notaris Terhadap Kesalahan Terjemahan Isi Akta Dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Asing” dalam MODELING, Jurnal Program Studi PGMI, Volume 4, Nomor 1, Maret 2017.

Hendra, Rahmad, “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1, Tahun 2012.

Purwaningsih, Endang. “Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum”, ADIL: Jurnal Hukum, Volume 2 No. 3, Desember 2011.

Sugesty, Meta, Hendro Saptono, dan Paramita Prananingtyas, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Loan Agreemeent Pada PT Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)”, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

Susanti, Christine. “Kedudukan Perjanjian yang berbahasa asing Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009”, UPH Law Review, Volume IX No. 3 Maret 2010.

Peraturan

Gubernur Daerah Ibukota Jakarta. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang persyaratan bagi Penerjemah Bersumpah yang tidak menerima Gaji dari pemerintah/Negara di Propinsi Jakarta. Kepgub DKI Jakarta No. 104 Tahun 2004.

Gubernur Jawa Timur. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1887 26/KPTS/013/2004 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Penerjemah Tersumpah.

Hindia Belanda. *Besluit van den Gouverneur,- Generaal van Nederlandsch- Indie van 7 august 1894 no. 16* Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 16 Tahun 1894, Stbd No. 169 Tahun 1894.

Indonesia. Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. UU No. 24 Tahun 2009, LN No. 109 Tahun 2009, TLN No. 5035.

_____. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

_____. Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Permenkumham No. 62 Tahun 2016.

_____. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah. Permenkumham No. 29 Tahun 2016.

_____. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009 tentang permohonan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) cetakan XXVII*, Jakarta:Pradnya Paramita, 2003.

Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 35/PDT.G/2010/PN.PRA.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572 K/Pdt/2015.

Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amanah>, diunduh pada tanggal 26 Oktober 2017, pukul 09.40 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jujur>, diunduh pada tanggal 26 Oktober 2017, pukul 09.40 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/saksama>, diunduh pada tanggal 26 Oktober 2017, pukul 09.40 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mandiri>, diunduh pada tanggal 26 Oktober 2017, pukul 09.40 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teliti>, diunduh pada tanggal 16 Mei 2018, pukul 19.30 WIB.

Sumber Lain

Wawancara dengan Audrey Tedja, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat, pada tanggal 28 Mei 2018.

Wawancara dengan Buchari Hanafi S.H., Notaris di Kota Tangerang, pada tanggal 04 Juni 2018.

